

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Jepang merupakan salah satu Negara yang sangat menarik untuk dikaji. Bukan hanya letak geografisnya yang menjadikan Jepang unik tapi juga berbagai hal lain seperti sejarah, ekonomi dan politik. Pengalaman sejarah Jepang yang tidak mengenakan pada Perang Dunia II membuat Jepang pernah menjadi Negara yang terasingkan dalam percaturan internasional, namun Jepang justru bangkit dan menggeliat dengan cepat. Sebagai Negara yang dijuluki lonely planet, Jepang mampu menunjukkan dirinya bahwa segala kekurangan yang dimiliki secara geografis maupun sumber daya alam tidak semata-merta membuat Jepang tumbuh menjadi Negara yang lemah. Berbagai kebijakan pemerintah berhasil membuat Jepang maju dalam berbagai bidang salah satunya adalah ekonomi.

Munculnya Jepang sebagai kekuatan ekonomi raksasa di dunia dari keadaan masyarakat feodal-agraris yang miskin dalam waktu hanya seratus tahun sungguh merupakan riwayat keberhasilan. Jepang berhasil tumbuh dalam lingkungan yang miskin akan sumber-sumber daya alam dan tanah, tetapi kaya akan sumber-sumber daya manusia.¹ Selain sejarah perkembangan Jepang yang menarik, adanya Cina sebagai salah satu Negara penerima ODA yang notabene secara ekonomi adalah salah satu Negara termaju di Asia. Kemajuan tersebut terlihat pada besarnya GDP yang diperoleh Cina. Peran Cina dalam era globalisasi

¹ Yoshihara Kunio, perkembangan ekonomi Jepang, Gramedia, Jakarta, 1983, hlm 9

yang meningkat 5 tahun terakhir, menjadikan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dinilai perlu untuk diperhatikan.

Adapun alasan lain, dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan, pembahasan ODA Jepang terhadap Negara lain sudah banyak dilakukan seperti terhadap Indonesia akan tetapi yang membahas tentang ODA Jepang ke Cina masih jarang bahkan belum ada sebelumnya yang membahas secara spesifik akan hal ini. Selain itu ODA Jepang menurut data terkini terakhir diberikan ke Cina pada tahun 2008. Setelah tahun 2008 Jepang belum memberikan ODA lagi kepada Cina. Dengan membahas ODA Jepang ke Cina, dapat mengetahui hubungan dua raksasa ekonomi dunia dalam persepsi bantuan luar negeri. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik membahas kepentingan pemerintah Jepang dalam kebijakan ODA ini. Sehingga penulis mengangkat sebuah judul “Kepentingan Jepang dalam pemberian Official Development Assistance terhadap Cina pada tahun 2008”.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan kebijakan ODA Jepang terhadap Cina pada tahun 2008.
2. Untuk mengetahui kepentingan Jepang dalam pemberian ODA terhadap Cina pada tahun 2008.
3. Sebagai manifestasi dari pengaplikasian teori-teori yang penulis dapatkan selama masih duduk di bangku kuliah.

C. Latar Belakang Masalah

Awal Jepang merentas jalan sebagai Negara maju sudah dimulai sejak abad ke-18, ketika Jepang mengalami beberapa peristiwa sejarah hingga sampai pada masa Jepang berada dibawah karakteristik *fukoko kyohei* bahwa Negara kuat adalah Negara yang kuat secara militer. Karakteristik Jepang pada masa ini untuk melakukan ekspansi ke Negara lain agar mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan Jepang untuk membangun negaranya. Hal tersebut juga didukung oleh kondisi di dalam negeri Jepang yang masih dipengaruhi oleh *Sogun Shogunate* yang memang identik dengan militer. Sogun merupakan kelas tertinggi dalam kasta masyarakat Jepang pada masa itu. Semenjak itu agresifitas militer Jepang semakin tidak dapat dihindari. Jepang melancarkan agresi militer ke beberapa Negara Asia diantaranya adalah Asia Tenggara dan Asia Timur. Ketika melakukan agresi Jepang memanfaatkan Negara tersebut untuk dijadikan sebagai penyuplai kebutuhan Jepang terutama sumber daya alam. Peristiwa kekejaman militer Jepang menjadi sejarah kelam yang sangat sulit dilupakan oleh korban perangnya. Banyak Negara yang menjadi korban perang seperti Indonesia, Korea Selatan termasuk Cina yang tidak luput dari peristiwa tersebut. Insiden Mukden menandai masa-masa kelam dalam sejarah panjang Cina pada masa penjajahan Jepang, yang harus "takluk" berulang kali pada Kekaisaran Jepang di periode akhir abad ke-19 hingga akhir Perang Dunia II. Insiden Mukden menjadi tonggak sejarah penting "penghinaan" Jepang terhadap China, di samping tragedi

Pemeriksaan Nanking, Desember 1937.² Pengalaman sejarah tersebut yang membuat hubungan politik Jepang dan Cina kurang berjalan dengan baik.

Terlepas dari sejarah kelam pada masa lalu, Jepang merupakan salah satu Negara yang dianggap paling sukses dalam membangun perekonomiannya. Hal ini terbukti dari perjalanan panjang sejarah pembangunan ekonomi Jepang yang terbagi menjadi dua bagian yakni: pada abad kesembilan-belas (zaman restorasi meiji sebagai industrialisasi awal Jepang) sampai awal Perang Dunia Kedua, serta dari masa ‘pertumbuhan cepat’ (pasca Perang Dunia Kedua, 1950-an) sampai saat ini. Pada masa “pertumbuhan cepat” Jepang tidak lagi menggunakan prinsip *fukoko kyohei* akan tetapi telah berubah menjadi Negara yang berprinsip *fukoko kenzai*, bahwa Negara kuat adalah Negara yang kuat secara ekonomi. Pola hubungan Jepang dengan negara lain tidak lagi mengandalkan militer tetapi mementingkan ekonomi. *Fukoko kenzai* muncul setelah adanya *Yoshida Doctrine*. Perubahan dalam prinsip Jepang, telah memperkuat posisi Jepang sebagai negara yang mampu untuk memajukan perekonomiannya, terutama untuk masa setelah PD II, Jepang telah menjalankan tugas sulit. Dalam melakukannya Jepang tidak saja berhasil membangun kembali ekonomi dari keadaan hancur pada akhir perang, melainkan juga telah berhasil meraih tingkat kemakmuran hingga saat ini. Dimana keadaan ekonomi Jepang dapat berubah secara drastis, dari negara yang miskin menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar di dunia, khususnya di wilayah Asia.

²<http://internasional.kompas.com/read/2012/09/20/0812456/Akar.Dendam.Panjang.China.kepada.Jepang> di akses pada tanggal 19 November 2012

Seiring berkembang pesatnya sektor ekonomi, Jepang juga turut aktif dalam ekonomi global, antara lain dalam bidang bantuan ekonomi untuk Negara-negara berkembang. Pada tahun 1969 *Development Assistance Committee* (DAC) dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) memperkenalkan konsep *Official Development Assistance* atau ODA yang berarti bantuan resmi pemerintah untuk pembangunan. Jepang sebagai anggota DAC mengimplementasikan ODA dalam bentuk kebijakan luar negeri. Program bantuan Jepang yang diberikan kepada Negara-negara berkembang dikenal dengan Bantuan Pembangunan Pemerintah atau *Official Development Assistance* (ODA). ODA bisa dijelaskan sebagai bentuk bantuan dan pinjaman. Program ODA merupakan salah satu bentuk bantuan dan pinjaman dari negara-negara maju yang tergabung dalam *Development Assistance Committee (DAC) of the Organization of Economic Cooperation and Development* ke Negara-negara berkembang. Dimana Jepang dalam hal ini, sebagai salah satu negara pendirinya.

Pemanfaatan ODA Jepang sendiri difokuskan dalam empat bidang prioritas. Yaitu pengentasan kemiskinan, pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan isu-isu global dan menciptakan perdamaian. bantuan ekonomi Jepang disalurkan melalui tiga cara, yaitu : dalam bentuk pinjaman (Yean Loan), hibah (Grant Aid) dan kerjasama teknik (Technical Cooperation).³ Sasaran penerima ODA diprioritaskan bagi Negara-negara ASEAN termasuk Asia Timur yang didalamnya terdapat Cina. Cina menjadi salah satu Negara penerima ODA Jepang terbesar di Asia. Secara bertahap, Jepang

³ B.N. Marbun, Manajemen Jepang, 1995.

memberikan banyak bantuan dana ke berbagai sektor ekonomi Cina dan pembangunan infrastruktur Cina yang lain. ODA yang diberikan Jepang terhadap Cina dimulai sejak tahun 1979, semenjak ODA diberikan sampai sekarang jumlah bantuannya mencapai 3.1331 triliun yen dalam bentuk pinjaman (yen loans), 145.7 milyar yen dalam hibah, dan 144.6 milyar yen dalam kerjasama teknis.⁴ Diantara negara-negara DAC (Development Assistance Committee), Jepang merupakan donor ODA (Official Development Assistance) terbesar bagi China selama periode 1991-1995.⁵ Dan pada tahun 1994-1996 China menjadi penerima ODA terbesar Jepang.⁶

Perkembangan ODA yang diberikan Jepang untuk Cina sejak 1979 memang mengalami beberapa perubahan baik dalam bentuk jumlah maupun jenis bantuannya. Perkembangan ODA Jepang, pada awalnya ODA diberikan kepada Cina sebagai bentuk kompensasi atas kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Jepang. Namun seiring berjalannya waktu ODA Jepang mulai memasuki era baru yang lebih menonjolkan motif ekonomi dan politik. Setelah adanya revisi piagam ODA Jepang pada tahun 2003, terjadi pengurangan anggaran dan sistem pemberian ODA yang lebih menekankan pada formulasi dan implementasi dari kebijakan ODA Jepang itu sendiri bagi Negara penerima. Setelah terjadi beberapa revisi piagam ODA pada tahun 2003, Cina masih menempati posisi kedua dari 30 penerima ODA bilateral Jepang terbesar pada tahun 2003 sebesar US\$ 759.72 juta setelah Indonesia yang menempati posisi pertama sebesar

⁴http://www.mofa.go.jp/policy/oda/region/e_asia/china/index.html diakses pada 26 Oktober 2012

⁵Lim Hua Sing, *Peranan Jepang di Asia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm. 271

⁶*Ibid*, Hlm. 269.

US\$1,141.78 juta.⁷ Bantuan Jepang terus berkesinambungan dan berdasarkan data terkini, ODA Jepang terakhir yang diberikan ke Cina adalah dalam bentuk hibah dan kerjasama teknis senilai 5,4 miliar yen (USD 66 juta).⁸

Ekonomi Cina yang terus meningkat terbukti PDB Cina melampaui PDB Italia pada tahun 2000, Prancis tahun 2005, Inggris tahun 2006, Jerman tahun 2007 dan akhirnya mengalahkan PDB Jepang pada tahun 2010.⁹ Hal tersebut ternyata tidak menyurutkan niat Jepang untuk tetap memberikan bantuan terhadap Cina. Prestasi hebat yang dicapai Cina sekarang ini juga mengungkapkan 1 fakta penting yaitu jumlah populasilah yang turut membantu tingginya GDP yang bisa dicapai Cina. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam 30 tahun terakhir memang telah mengangkat ratusan juta rakyat Cina dari garis kemiskinan dan membuat Cina menjadi raksasa manufaktur dunia. Jumlah penduduknya yang 11 kali lipat lebih banyak dari Jepang membuat total nilai GDP China menjadi begitu besar walaupun GDP per kapita mereka jauh lebih kecil. Secara garis besar ekonomi Cina dan Jepang dalam posisi yang seimbang. Kemajuan ekonomi Cina tidak terlepas dari peran serta Jepang yang mendorong pembangunan Cina dengan berbagai bantuan salah satunya adalah Official Development Assistance sehingga Cina mampu tumbuh dengan cepat.

Pada tahun 2004 Cina menempati urutan pertama sebagai penerima donor dari Jepang dengan jumlah bantuan sebesar US\$ 964.69 juta, posisi kedua sebesar US\$ 1,064.27 juta pada 2005, pada tahun 2006 sebesar US\$ 561.08 juta juga pada

⁷<http://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2004/part3-2.pdf> diakses pada 27 Oktober 2012

⁸<http://economy.okezone.com/read/2011/03/03/213/430853/jepang-tinjau-hibah-ke-china> diakses pada 20 juli 2012

⁹<http://www.scribd.com/doc/95028872/China-as-a-Strenght-China-sebagai-sebuah-Kekuatan> diakses pada 27 Oktober 2012

posisi kedua setelah Vietnam, pada tahun 2007 berada pada posisi ketiga dengan jumlah bantuan sebesar US\$ 435.66 juta dan pada tahun 2008 Cina berada pada posisi kelima dengan bantuan sebesar US\$ 278.25 juta.¹⁰ Meskipun pada tahun 2008 bantuan luar negeri Jepang untuk Cina mengalami penurunan, jumlah ODA yang diberikan masih dalam jumlah besar. Disaat ekonomi Jepang mengalami kemunduran sejak tahun 1997-an Jepang masih saja memberikan bantuan dengan jumlah besar terhadap Cina, dimana Cina sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam bidang industri yang justru seharusnya memberikan kekhawatiran bagi Jepang. Pada tahun 2008 jumlah PDB Cina mencapai US\$ 4.4216 triliun,¹¹ sedangkan PDB Jepang sebesar US\$ 4,923 triliun.¹² Perbedaan PDB antara Jepang dan Cina yang tipis membuktikan bahwa Cina saat ini bukanlah Negara biasa-biasa saja tetapi pesaing yang nyata bagi eksistensi Jepang. Selain itu tahun 2007 untuk pertama kalinya anggaran militer Cina melampaui Jepang (no 6).¹³ Sedangkan pada tahun 2008 Cina menaikkan anggarannya lagi sebesar 409.9 milyar yuan, naik 17.7 persen. Anggaran militer Cina ini berada pada posisi kedua setelah Amerika Serikat dengan anggaran sebesar US\$ 121.9 milyar.¹⁴

¹⁰http://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2009/html/honbun/b3/s2_03.html diakses pada tanggal 27 Oktober 2012

¹¹ http://www.china.org.cn/business/news/2009-01/22/content_17169174.htm diakses pada tanggal 19 November 2012

¹² <http://finance.detik.com/read/2009/06/10/172541/1145675/6/jumlah-investor-pasar-modal-indonesia-cuma-317-ribu> diakses pada tanggal 19 November 2012

¹³http://www.jurnalnet.com/konten.php?nama=KolomFeature&op=cetak_aspirasi_kolom_feature&id=105 diakses pada tanggal 27 Oktober 2012

¹⁴<http://mardoto.com/2009/02/11/anggaran-militer-negara-negara-di-dunia-tahun-2008-indonesia-ranking-3/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2012

Meningkatnya anggaran militer Cina bisa menjadi kekhawatiran bagi Jepang. Terlebih secara militer Jepang dibatasi oleh konstitusi yang mengatur bahwa besar anggaran militer Jepang hanya 1% dari GDP. Secara ekonomi pertumbuhan Cina menggambarkan bahwa saat ini Cina bukanlah Negara yang sesuai menerima bantuan luar negeri dari Jepang. Melihat keadaan ini pemberian ODA Jepang pada tahun 2008 kepada Cina menjadi penting untuk dicermati.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: "Mengapa Jepang masih memberikan Official Development Assistance terhadap Cina pada tahun 2008?"

E. Kerangka Teori

Seperti yang terdapat pada karya ilmiah lainnya, maka dalam penulisan skripsi ini juga dibutuhkan suatu kerangka dasar teori. Teori dapat dikatakan sebagai suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.¹⁵ Teori-teori menceritakan pada kita fakta-fakta mana yang penting dan mana yang tidak penting, yaitu mereka menyusun pandangan

¹⁵ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, PT. Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta, September 1994, Hal. 185.

kita atas dunia.¹⁶ Dalam sebuah teori akan menggambarkan serangkaian konsep hingga menjadi sebuah penjelasan yang akan menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu saling berhubungan.

Untuk mempermudah analisa penelitian mengenai pokok permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan konsep bantuan luar negeri.

Konsep Kebijakan Luar Negeri

Dalam hal ini kebijakan politik luar negeri menurut K.J. Holsti adalah ide-ide atau tindakan yang dirancang oleh pembuat keputusan-keputusan untuk menghasilkan atau mendorong terjadinya perubahan kebijakan luar negeri adalah kegiatan yang sarat maksud. Meskipun beberapa kebijakan dibuat untuk mengubah kondisi di luar negeri demi meraih kepentingan dalam negeri.¹⁷

K.J. Holsti juga menyebutkan enam faktor utama yang sangat menentukan kebijakan luar negeri dalam suatu negara, yaitu pertama faktor pembuat kebijakan dalam negeri, hal ini berkaitan dengan nilai-nilai, kepercayaan, personalitas dan kepentingan politik dari mereka yang bertanggung jawab dalam menentukan objek kebijakan yang harus didahulukan, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai objek tersebut.

Kedua adalah faktor internasional, yaitu struktur sistem internasional seperti menentukan nasib sendiri, kebebasan politik, situasi dan peristiwa diluar negeri seperti runtuhnya suatu pemerintahan di negara lain atau terjadinya perang.

¹⁶Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Februari 2005, Hal. 81.

¹⁷K.J. Holsti *International Politics : A Framework For Analysis*, New Jersey : Prentice Hall International, 1992, hal 269-271.

Menurut Holsti, kebijakan luar negeri dapat terpengaruh oleh perkembangan di luar negeri karena kebijakan tersebut juga dianggap sebagai tanggapan terhadap perkembangan tersebut.

Ketiga, faktor domestik, dan dalam hal ini terdapat dua jenis kebutuhan domestik, yang pertama kepentingan kelompok-kelompok tertentu didalam negara seperti kepentingan partai politik dan kepentingan organisasi ekonomi, dan yang kedua berupa kebutuhan sosial ekonomi yang timbul karena keadaan geografi, demografi dan persediaan sumber daya alam negara yang bersangkutan ditambahkan oleh Holsti bahwa, ketergantungan suatu negara terhadap negara lain ditentukan oleh letak geografis, keadaan alam dan juga persediaan sumber-sumber kekayaan alam.

Keempat adalah faktor atribut dan perilaku nasional. Dan hal ini dapat dilihat melalui tingkat kemajuan Negara, tipe pemerintahan, jumlah dan tingkat kemajuan negara.

Kelima adalah faktor pendapat umum atau sikap-sikap, nilai-nilai dan pendapat masyarakat mengenai kebijakan luar negeri.

Keenam adalah faktor kepentingan, nilai-nilai dan mengenai tradisi birokratis. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan dan prosedur birokratis negara yang mempengaruhi seorang pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan negara pemerintah yang berkuasa sebagai aktor pengambil kebijakan luar negeri.

Konsep Bantuan Luar Negeri

Dalam sistem global, bantuan luar negeri merupakan bagian yang tidak

bisa dipisahkan karena adanya pola kekuatan yang terstruktur.¹⁸ Bantuan luar negeri serupa dengan diplomasi, propaganda, maupun aksimiliter yang ditujukan oleh suatu Negara terhadap negara lain. Seperti yang diungkapkan oleh Weisman bahwa bantuan luar negeri adalah komponen diplomasi dan dapat dikatakan sebagai alat pengontrol yang efektif, setidaknya untuk mempengaruhi tindakan negara lain.¹⁹

K.J holsti, dalam bukunya *International Politics: Framework of Analysis*, mengartikan bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasehat-nasihat teknis dari Negara donor ke Negara penerima.²⁰ Ada pandangan berbeda mengenai bantuan luar negeri menurut Alan Rix dalam bukunya *Japan's Foreign Aid Challenge: Policy Reform And Aid Leadership*. Menurutnya, pemberian bantuan luar negeri antara Negara donor dan Negara penerima bantuan tidak terlepas dari maksud dan motivasi para Negara pendonor.²¹ Motivasi yang di maksud Alan Rix yaitu:

- a. Motif kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Negara-negara berkembang melalui dukungan kerjasama ekonomi.
- b. Motif politik, yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan imej Negara pendonor , peralihan pujian menjadi tujuan pemberian bantuan luar negeri baik dari sektor domestik maupun hubungan luar negeri donor. Bantuan luar negeri yang dimaksud Alan Rix dapat dihubungkan sebagai jalan soft

¹⁸Rugumamu, 1997. Hal 200

¹⁹Picard, Louis A. Dan Groelsema, Robert. 2008. *U.S. Foreign Aid Priorities: Goals for the Twenty-First Century. Foreign Aid and Foreign Policy: Lessons for the Next Half-Century*. Transnational Trends in Governance and Democracy. New York: National Academy of Public Administration

²⁰K. J. Holsti. 1995. *International Politics: Framework of Analysis*. Prentice Hall: New Jersey, hal.180

²¹Alan Rix. 1993. *Japan's Foreign Aid Policy Reform and Aid Leadership*. Roudedge: London and New York, hlm. 18-19

power. Menurut Joseph Nye, soft power diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk menjadikan Negara-negara lain memiliki keinginan sesuai dengan keinginan-keinginan Negara tersebut melalui kebudayaan dan idiologi yang dimilikinya. Jika kebudayaan dan idiologi suatu negara menarik, negara-negara lain akan mengikuti pola kepemimpinannya. Dimana soft power memiliki peran yang sama pentingnya dengan hard power (kebijakan yang bertumpu pada kekuatan ekonomi dan militer).²²

- c. Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan Negara donor dengan kata lain, motif keamanan nasional itu juga memiliki sisi ekonomi.
- d. Motif kepentingan nasional, yaitu motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional Negara pendonor.

Dalam kasus Jepang, pemberian bantuan luar negeri yang diberikan Jepang terhadap Cina pada tahun 2008 merupakan hasil kebijakan luar negeri yang menurut K.J. Holsti dipengaruhi enam faktor. Yang paling sesuai dengan pokok masalah ini adalah faktor pembuat kebijakan dalam negeri, hal ini berkaitan dengan nilai-nilai, kepercayaan, personalitas dan kepentingan politik dari mereka yang bertanggung jawab dalam menentukan objek kebijakan yang harus didahulukan, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai

²² Joseph S. Nye, *The Changing Nature of World Power*, Political Science Quarterly of Chicago Press, 1963; hlm 545.

objek tersebut. Dimana aktor pembuat kebijakan mempertimbangkan dua hal yaitu motivasi dan strategi, seperti yang dinyatakan Alan Rix bahwa bantuan luar negeri suatu Negara donor terhadap Negara penerima bantuan tidak terlepas dari maksud dan motivasi.

Hubungan politik Jepang dan Cina yang fluktuatif karena sejarah masa lalu agresi Jepang, menjadi alasan bahwa ODA untuk Cina didasari adanya motif politik. Alan Rix menjelaskan, motif politik memusatkan tujuan untuk meningkatkan imej Negara pendonor, peralihan pujian menjadi tujuan pemberian bantuan luar negeri baik dari sektor domestik maupun hubungan luar negeri donor. Selain menjaga hubungan baik, pada tahun 2008 Jepang juga melihat keadaan militer Cina yang semakin meningkat sedangkan dipihak Jepang masih terikat oleh konstitusi yang secara jelas telah membatasi Jepang dalam hal militer. Maka dari itu Pencitraan Jepang kepada Cina juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan tindakan agresif Cina di masa yang akan datang. Dalam kasus Jepang bahwa bantuan luar negeri untuk Cina sebagai strategi pencitraan bagi Jepang, penulis menjadikan survei yang dilakukan media sebagai salah satu indikator penentu bahwa popularitas suatu Negara dimata Negara lain dipengaruhi oleh tindakan negara tersebut. Tindakan yang dimaksud adalah menjaga hubungan baik dengan Negara lain melalui bantuan luar negeri.

Jadi ODA yang di berikan Jepang untuk Cina yang merupakan motif politik untuk pencitraan juga dihubungkan cara Soft power Jepang untuk menghindari agresifitas militer Cina di kemudian hari. Seperti yang dijelaskan oleh Joseph nye bahwa soft power adalah kemampuan suatu negara untuk menjadikan

Negara-negara lain memiliki keinginan sesuai dengan keinginan-keinginan Negara tersebut melalui kebudayaan dan idiologi yang dimilikinya. Cara ini tidak mengandung kekerasan dan tidak akan memakan korban jiwa, menyebabkan kerusakan, menimbulkan banyak kerugian, melanggar hak asasi manusia dan lebih bisa diterima oleh siapapun dibanding dengan hard power. Namun, soft power memiliki peran yang sama pentingnya dengan hard power (kebijakan yang bertumpu pada kekuatan ekonomi dan militer).²³ Sehingga soft power menjadi cara Jepang untuk mengontrol Cina.

F. Hipotesa

Jawaban sementara yang dapat ditarik untuk menjawab pertanyaan pada pokok permasalahan pemberian ODA yang dilakukan Jepang terhadap Cina pada tahun 2008 sebagai berikut:

“Sebagai strategi pencitraan oleh Jepang kepada Cina untuk menjaga hubungan politik Jepang-Cina yang cenderung fluktuatif dan mengantisipasi agresifitas militer Cina dikemudian hari”

G. Jangkauan Penelitian

Pembatasan dalam penelitian dilakukan agar obyek penelitian tidak terlampaui luas dan dapat lebih fokus, juga agar permasalahan dan kajian melebur dan wacana yang telah ditetapkan untuk dikaji agar tidak terjadi penyimpangan.

²³ *Ibid*

Batas-batas dari kajian itu akan mencegah timbulnya penyimpangan yang terlalu luas dalam wilayah yang dibahas. Adapun jangkauan penelitian ini adalah fokus terhadap hubungan dua negara yang terdapat dikawasan Asia Timur yaitu Jepang dan China. Dimana Jepang menjadi salah satu negara pemberi bantuan luar negeri atau ODA terhadap China. Dan untuk memudahkan penelitian serta menghindari kesulitan dalam pencarian dan pengumpulan data, maka penulis memfokuskan penelitian pada ODA Jepang terhadap China tahun 2008. Akan tetapi tidak menutup juga kemungkinan penulis akan menengok peristiwa-peristiwa sebelumnya di luar masa tersebut yang dapat mendukung penelitian atas penulisan skripsi ini.

H. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian sangat berperan dalam menentukan hasil penelitian sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Keberadaan metode merupakan salah satu syarat diakuinya sesuatu menjadi ilmu pengetahuan, disamping syarat-syarat yang lain, yaitu mempunyai objek, sudut pandang terhadap objek metode, serta hasil-hasil pandangannya merupakan suatu kesatuan utuh dan bulat atau sistematis.²⁴ Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Seperti yang diungkapkan oleh DR. Lexy J. Moleong, M.A., dimana data-data yang

²⁴Surachman Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, 1980, Hal 2.

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.²⁵ yang menitik beratkan pada analisa data-data yang sifatnya non angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik. Meskipun demikian, penelitian secara kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Akan tetapi tidak terlalu banyak mendasarkan diri atas data statistik, tetapi memanfaatkan data statistik itu hanya sebagai cara untuk mengantar dan mengarahkan pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan dan dicari sendiri sesuai dengan tujuan penelitiannya.

Sedangkan analisis data penulis menggunakan kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi dan kemudian diambil kesimpulan atas fakta-fakta tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), data diperoleh melalui sumber-sumber yang berasal dari buku, jurnal, diktat, majalah, artikel, surat kabar, laporan penelitian dan melalui jaringan Internet.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan latar belakang permasalahan, pokok

²⁵Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002, Hal.6.

permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II Membahas profil Jepang dan sejarah hubungan diplomatik dengan Cina. Dalam bab ini akan dijelaskan sejarah dan profil Jepang, serta dinamika hubungan politik-ekonomi Jepang dengan Cina.
- BAB III Membahas tentang dinamika ODA sebagai kebijakan bantuan luar negeri Jepang terhadap Cina.
- BAB IV Membahas kepentingan politik Jepang dalam pemberian Official Development Assistance terhadap Cina pada tahun 2008.
- BAB V Berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan penulis dari bab-bab sebelumnya.